

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,16	75,89	0,97
2	Angka Kemiskinan	7,60	7,41	-2,5
3	Angka Pengangguran	3,77	3,21	-14,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,54	2,23	244,8
5	Pendapatan Per Kapita	127.550.000	133.880,000	4,96
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20,55	-	

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	Pendidikan PAUD				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	392	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	359	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.733	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.730	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1066	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	342	Orang	Disdikpora
		Pendidikan Dasar				
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	420	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.861	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10.982	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.581	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.539	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.374	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.125	Orang	Disdikpora
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	848	Orang	Disdikpora
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	236	Orang	Disdikpora
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	803	Orang	Disdikpora
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	288	Orang	Disdikpora
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1700	Orang	Disdikpora
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	771	Orang	Disdikpora
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	386	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Orang	Disdikpora
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	346	Orang	Disdikpora
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	204	Orang	Disdikpora
Pendidikan Menengah Pertama						
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	50	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	47.562	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	19.026	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.861	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10.983	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.581	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.538	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.374	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.398	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	848	Orang	Disdikpora
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	236	Orang	Disdikpora
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	803	Orang	Disdikpora
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	347	Orang	Disdikpora
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1700	Orang	Disdikpora
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	771	Orang	Disdikpora
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	386	Orang	Disdikpora
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	38	Orang	Disdikpora
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	346	Orang	Disdikpora
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	282	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Pendidikan Kesetaraan				
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	12	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	223	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	380	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	201	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	16	Orang	Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	16	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	16	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15.066		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.205	Orang	Dinas Kesehatan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.661		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan,persalinan sesuai standar	3.115	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.600		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3.115	Orang	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68.108		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3.083		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	125.543		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	576.104		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	88.188		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	231.173		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17.933		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.166		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.174	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.995		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.358	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.935		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.222	Orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	638.880	Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	17.702	M	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Nihil	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada wilayah pantai	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota						
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaran SPAM	Tidak ada	BUMD/UPTD	Dinas PUPR
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Izin	Dinas PUPR
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	Kerja sama	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2.056	Rumah	Dinas PUPR
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.356	Rumah	Dinas PUPR
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3.812	Rumah	Dinas PUPR
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	32	Rumah	Dinas PUPR
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	32	Rumah	Dinas PUPR
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1356	Rumah	Dinas PUPR
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	30,12	%	Dinas PUPR
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	0,94	%	Dinas PUPR
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	23,66	%	Dinas PUPR
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	23,66	%	Dinas PUPR
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	33,33	%	Dinas PUPR
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	11,53	%	Dinas PUPR
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100,00	%	Dinas PUPR
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,566	%	Dinas PUPR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	%	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	12.736	Izin	Dinas PUPR
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	1	Bangunan	Dinas PUPR
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	0	Bangunan	Dinas PUPR
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	3.743	Bangunan	Dinas PUPR
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	173	Bangunan	Dinas PUPR
Rasio kemantapan jalan						
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/ kota	639.262	M	Dinas PUPR
		2	Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Panjang jembatan yg dibangun	12	M	Dinas PUPR
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan	8.785,16	M	Dinas PUPR
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	93	M	Dinas PUPR
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	21.417,86	M	Dinas PUPR
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		8	Panjang jalan yang dipelihara	8.395	M	Dinas PUPR
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	235	M	Dinas PUPR
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli						
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	0	Orang	Dinas PUPR
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota	164	Orang	Dinas PUPR
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	164	Orang	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	78	Badan Usaha	Dinas PUPR
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	izin	Dinas PUPR
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Kecelakaan Konstruksi	Dinas PUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	22.433	Unit	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2.352	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2.613	Orang	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	Unit	Dinas PKPLH
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Unit	Dinas PKPLH
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	Unit	Dinas PKPLH
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	99	Unit	Dinas PKPLH
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	NIHIL	Orang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	NIHIL	Ha	Dinas PKPLH
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Ha	Dinas PKPLH
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani						
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha	8,589	Ha	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	437	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	136,814	Ha	Dinas PKPLH
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						
		1	Jumlah rumah di kab/kota	246.714	Rumah	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit PK RTLH	437	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.774	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	271	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Rasio rumah dan KK	1,15	%	Dinas PKPLH
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	269		Dinas PKPLH
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	40	Perumahan	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	98	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	246.714	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi(on site / off site)	100	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	9	Perumahan	Dinas PKPLH
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	246.714	Rumah	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Pengembang	Dinas PKPLH
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
1		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	1942	Jumlah	Satpol PP	
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4.137	Orang	Satpol PP	
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	56	Perda& Perkada	Satpol PP	
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	Orang	Satpol PP	
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	10	Orang	Satpol PP	
6		Tersedianya sarana prasarana minimal	1	SOP	Satpol PP	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
1		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD	
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	%	BPBD	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
1		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD	
2		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD	
3		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1,07	%	BPBD	
4		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1,92	%	BPBD	
5		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	10,97	%	BPBD	
6		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	%	BPBD	

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	%	BPBD
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	%	BPBD
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	BPBD
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	46	Layanan	Satpol PP
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Nihil	Pos	Satpol PP
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Nihil	Orang	Satpol PP
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Nihil	Pos	Satpol PP
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3	Sarpras	Satpol PP
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	32	Orang	Satpol PP
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	103	Orang	Satpol PP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2	Keg	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
		1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	4	layanan	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM	2009	orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	1	tim	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dijangkau	1744	orang	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	1 unit mobil resque	unit	DinsosP3A P2KB
6	Sosial	6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanaan Sesuai Standar Gizi	413	Orang	DinsosP3A P2KB
		7	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar	1	unit	DinsosP3A P2KB
		8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	20	Orang	DinsosP3A P2KB
		9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	37	Orang	DinsosP3A P2KB
		10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter	1 kursi roda 2 kruk	unit	DinsosP3A P2KB
		11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	-	Paket	DinsosP3A P2KB
		12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	-	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah	-		DinsosP3A P2KB
		14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	1	Orang	DinsosP3A P2KB
		15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1744	Orang	DinsosP3A P2KB
		16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	1 bl 1 kali		DinsosP3A P2KB
		17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	39	orang	DinsosP3A P2KB
		18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	44	orang	DinsosP3A P2KB
		19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	9	orang	DinsosP3A P2KB
		20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga	9	Orang	DinsosP3A P2KB
		21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk	49	Orang	DinsosP3A P2KB
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	14.554	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	431	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	132 desa/kel	Penampungan	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	230	Paket	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	4034	Orang	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	33	Orang	DinsosP3A P2KB
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	Ada/Tidak	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	3	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	21,43	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	77	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,11	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	0,15	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	2704	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase penyerapan lulusan	52,7	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	2,26	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	77,09	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	4	Pelatihan	Disnaker perinkop UKM
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja						
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,09	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Data tingkat produktivitas total	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	62,8	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	102,38	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	94.983	SP/SB	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	92,53	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,6	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah Mogok Kerja	0	Mogok	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah Penutupa Perusahaan	0	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Perselisihan Kepentingan	0	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan	0	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Perselisihan PHK	10	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		12	Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK	16	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		13	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite	4	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan	1	LKS	Disnaker perinkop UKM
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	40	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kab dalam 1 (satu) daerah kab				
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab	3.509	Lowongan Kerja	Disnaker perinkop UKM
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	67.709	Orang	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab	23	BKK	Disnaker perinkop UKM
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota	0	Orang	Disnaker perinkop UKM
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	5	Orang	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab	0	Lembaga	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab	13	Perjanjian	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	3195	orang	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	358	Orang	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	358	Orang	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan	0,00	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan & Pelatihan Kerja	77,09	%	Disnaker perinkop UKM
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan Keluarganya	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
		14	Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentuk (layanan TKI / PMI)	50,00	%	Disnaker perinkop UKM
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		1	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab Yang Telah Dilatih PUG	34 OPD 27 Desa	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab	24	Prog/ Keg	DinsosP3A P2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				
		1	Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjsama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2	Media Massa	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM	6	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		3	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	4,7	%	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan	6	lembaga	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab/Kota (APBD Kab)	-	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak				
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	1	organisa si	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	7	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemkab	2 JPPA dan forum anak	Lemba ga	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	tdk ada	Kebijakan/ Program	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 (JPPA)	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	DinsosP3A P2KB
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan				
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		2	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.250	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	10	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan oleh Bupati	100	%	Dinas PUPR
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	%	Dinas PUPR
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	tidak ada		Dinas PUPR
		4	Dokumen Izin membuka tanah	tidak ada		Dinas PUPR
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kab	tidak ada		Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten				
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :			Dinas PKPLH
			a) Indeks Kualitas Air, (IKA)	43,75		Dinas PKPLH
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,63		Dinas PKPLH
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			Dinas PKPLH
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten				
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten		%	Dinas PKPLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	92,86	%	Dinas PKPLH
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	0,003	%	Dinas PKPLH
		3	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten	0	%	Dinas PKPLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	%	Dinas PKPLH		
5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	100,00	%	Dinas PKPLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	147,25	%	Dinas Dukcapil
		2	Penerbitan akta perceraian	200	%	Dinas Dukcapil
		3	Penerbitan akta kematian	100	%	Dinas Dukcapil
		4	Penyajian data kependudukan	300	%	Dinas Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Desa	Dinas PMD

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	Desa	Dinas PMD
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	109,00	Desa	Dinas PMD
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5,00	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5719,00	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	80,00	Desa	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Ada/ Tidak	DinsosP3A P2KB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25-49	Nilai Tengah	DinsosP3A P2KB
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	242	orang	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1,7	%	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7	Stakeholder	DinsosP3A P2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
		1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,93	%	DinsosP3A P2KB
		3	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	21	kampung KB	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	87,61	%	DinsosP3A P2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
		1	Persentase kesertaan KB di kab dgn kesertaan rendah	44	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	70,45	%	DinsosP3A P2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kota				
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0,02	%	Dishub
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	198,31	%	Dishub
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	3,292	%	Dishub
		V/C Ratio di Jalan kota				
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten aatau kota	78,21	%	Dinas Perhubungan
19	Komunikasi dan Informatika	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Ada/ Tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	20,63	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	75,76	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	64,49	%	Dinas Kominfo
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	11,59	%	Dinas Kominfo
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	34,21	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	43,86	%	Dinas Kominfo
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	%	Dinas Kominfo
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	%	Dinas Kominfo
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	78,79	%	Dinas Kominfo
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Ada/ tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabuapten/ kota	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	27,62	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,23	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15,1	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,11	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,23	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,6	%	Disnaker perinkop UKM
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota	8,47	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	0	%	Disnaker perinkop UKM
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/ kota	21,73	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota	0	%	Disnaker perinkop UKM
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,94	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	7,59	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,47	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,47	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,11	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4,21	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	2,52	%	Disnaker perinkop UKM
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten				
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	ada	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Jumlah Laporan	Dinas PMPTSP
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.702	Jumlah Konsultasi	Dinas PMPTSP
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6645	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Laporan realisasi penanaman modal	1.086.472.800.000	(Rupiah)	Dinas PMPTSP
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kabupaten/kota	22		Dinas PMPTSP
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	270	Perusahaan	Dinas PMPTSP
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	8	Ada/Tidak	Dinas PMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	74	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Orang	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	200	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100	Orang	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	161	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	25	Event	Disdikpora
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah	ada	Ada/tidak	Dinas Kominfo
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	8	Jml kompilasi	Dinas Kominfo
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1	Jumlah Kompilasi	Dinas Kominfo
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	66,67	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	0	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	50,88	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	47,06	%	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	115	Obyek	Disbudpar
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	48	Obyek	Disbudpar
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	92	Obyek	Disbudpar
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Orang	Disbudpar
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	25	Cagar Budaya	Disbudpar
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	222	Cagar Budaya	Disbudpar
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	0	Cagar Budaya	Disbudpar
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	2	Cagar Budaya	Disbudpar

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2	Cagar Budaya	Disbudpar
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	224	Koleksi	Disbudpar
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	75415	Orang	Disbudpar
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			Disbudpar
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Tim	Disbudpar
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	1	Tim	Disbudpar
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Tim	Disbudpar
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	41	Orang	Disbudpar
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	9	Orang	Disbudpar
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	12	Unit	Disbudpar
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	26	Kegiatan	Disbudpar
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
			Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			Dinas Arpus
			Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		%	Dinas Arpus
			Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		%	Dinas Arpus
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		%	Dinas Arpus
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	Dinas Arpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1	Naskah Kuno	Dinas Arpus

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data		
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	Dinas Arpus		
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	116 buku	Budaya Etnis	Dinas Arpus		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		%	Dinas Arpus		
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		%	Dinas Arpus		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		%	Dinas Arpus		
			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		%	Dinas Arpus		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
				6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	560	orang	Dispertan pangan		

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	%	Dispertan pangan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan	0	Izin	Dispertan pangan
		4	Jml pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	170	Pembudidaya	Dispertan pangan
		5	Jml benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	118.080.000	Benih	Dispertan pangan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	66		Disbudpar
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	679		Disbudpar
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota	15	TDUP	Disbudpar
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11	orang	Disbudpar
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9	Kegiatan	Disbudpar
		6	Jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	11	orang	Disbudpar
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	2	Industri	Disbudpar
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	10,466		Disbudpar
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	71,42		Disbudpar
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	28	Lokasi	Disbudpar
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dokumen	Dinas PUPR
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	11		Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	2,513		Dinas PUPR
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		Dinas PUPR
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/ tidak	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Dinas Perdagangan
			a. Pusat perbelanjaan	0	%	
			b. Toko swalayan	0	%	
		2	presentas epenerbitan TDG	11,00	%	Dinas Perdagangan
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	318,00		Dinas Perdagangan
		4a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
		4b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	0,00	%	Dinas Perdagangan
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	%	Dinas Perdagangan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	9,00	%	Dinas Perdagangan
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	60,30	%	Dinas Perdagangan
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	0,00	Pengaduan	Dinas Perdagangan
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	0,00	Konsumen	Dinas Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk				
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	21595,477		Dinas Perdagangan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	10499	%	Dinas Perdagangan
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	2,00	%	Dinas Perdagangan
31	Perindustrian		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota			
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	%	Disnaker perinkop UKM
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	0	%	Disnaker perinkop UKM
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di ka/kota	3,49		Disnaker perinkop UKM
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,185	%	Disdikpora
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,038	%	Disdikpora
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,785	%	Disdikpora
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	22,849	%	Disdikpora
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,151		Dinas Kesehatan
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	94,118	%	Dinas Kesehatan
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,394	%	Dinas Kesehatan
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%	Dinas Kesehatan
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,022	%	Dinas Kesehatan
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,919	%	Dinas Kesehatan
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,403	%	Dinas Kesehatan
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,020	%	Dinas Kesehatan
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,690	%	Dinas Kesehatan
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52,043	%	Dinas Kesehatan
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,243	%	Dinas Kesehatan
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72,853	%	Dinas Kesehatan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	72,915	%	Dinas Kesehatan
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	97,808	%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100	%	Dinas PUPR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	tidak ada wilayah pantai	%	Dinas PUPR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	900024,67	%	Dinas PUPR
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	98,247	%	Dinas PUPR
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	Dinas PUPR
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	%	Dinas PMPTSP
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	93,341	%	Dinas PUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47,399	%	Dinas PUPR
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	%	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	%	Dinas PKPLH
		28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0,00	%	Dinas PKPLH
		29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	94,092	%	Dinas PKPLH
		30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,746	%	Dinas PKPLH

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00	%	Dinas PKPLH
5	Ketentrama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	96,257	%	Satpol PP
		33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	96,552	%	Satpol PP
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	140210	Orang	BPBD
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	120424	Orang	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	130384	Orang	BPBD
		37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	BPBD
		38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,56	Menit	Satpol PP
		6	Sosial	39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90,366
40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten			100	%	Dinsos P3AP2KB
7	Tenaga Kerja	41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	78,947	%	Disnaker Perinkop UKM
		42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,794	%	Disnaker Perinkop UKM
		43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14340156 6,849		Disnaker Perinkop UKM
		44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	63,595	%	Disnaker Perinkop UKM
		45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	47,623	%	Disnaker Perinkop UKM

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	55,493	%	Dinsos P3AP2KB
		47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	%	Dinsos P3AP2KB
		48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,971	Per 100.000	Dinsos P3AP2KB
9	Pangan	49	Persentase cadangan pangan	188,575	%	Disperten Pangan
10	Pertanahan	50	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	%	Dinas PUPR
		51	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0,00	%	Dinas PUPR
		52	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0,00	%	Dinas PUPR
		53	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00	%	Dinas PUPR
		54	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0,00	%	Dinas PUPR
		55	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%	Dinas PUPR
11	Lingkungan Hidup	56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	54,88	%	Dinas PKPLH
		57	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	38633,349	%	Dinas PKPLH
		58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	21,711	%	Dinas PKPLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59	Perekaman KTP Elektronik	97,669	%	Dinas Dukcapil
		60	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,65	%	Dinas Dukcapil
		61	Kepemilikan akta kelahiran	98,481	%	Dinas Dukcapil
		62	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33,33	%	Dinas Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	Persentase pengentasan desa tertinggal	tdk ada desa tertinggal	%	Dinas PMD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		64	Persentase peningkatan status desa mandiri	56,757	%	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08		Dinsos P3AP2KB
		66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,315	%	Dinsos P3AP2KB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15,686	%	Dinsos P3AP2KB
15	Perhubungan	68	Rasio konektivitas kabupaten	0,68		Dishub
		69	Kinerja lalu lintas kabupaten	56		Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	64,486	%	Dinas Kominfo
		72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab	75,012	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,60	%	Disnaker Perinkop UKM
		74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100	%	Disnaker Perinkop UKM
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	-34,293	%	Dinas BMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,636	%	Disdikpora
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	73,329	%	Disdikpora
		78	Peningkatan prestasi olahraga	40	Medali	Disdikpora
20	Statistik	79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
		80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah	38,295		Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya	61,667	%	Disbudpar

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
23	Perpustakaan	83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	23,78	%	Dinas Arpus
		84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,66	%	Dinas Arpus
24	Kearsipan	85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	21,49	%	Dinas Arpus
		86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	27,62	%	Dinas Arpus
Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	2735,20	Ton	Dispertan Pangan
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0,00	%	Disbudpar
		89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	81,685	%	Disbudpar
		90	Tingkat Hunian akomodasi	21,141	%	Disbudpar
		91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,763	%	Disbudpar
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,183	%	Disbudpar
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	659,97	ton	Dispertan Pangan
		94	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	tidak ada kasus	%	Dispertan Pangan
28	Kehutanan			Tidak Perlu Diisi		
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0,00	%	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	0,00	%	Dinas Perdagangan
		97	Persentase kinerja realisasi pupuk	96,546	%	Dinas Perdagangan
		98	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68,621	%	Dinas Perdagangan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,369	%	Disnaker Perinkop UKM
31	Perindustrian	100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	%	Disnaker Perinkop UKM
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0,00	%	Disnaker Perinkop UKM
		104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		Disnaker Perinkop UKM
32	Transmigrasi					

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	107,890	%	BPPKAD
		2	Persentase PAD	19,907	%	BPPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	Level	Inspektorat
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3	Level	Inspektorat
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	14,182	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Inspektorat
					WTP	
					WTP	
					WTP	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	%	Bagian PBJ
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	54,909	%	Bagian PBJ
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,94	%	Bagian PBJ
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	61,45		Bagian PBJ
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,652	%	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,158	%	BKPSDM
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50,00	%	BKPSDM
36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	13,5232	%	BPPKAD
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,7233	%	BPPKAD
		15	Assets management	4,00	Jumlah	BPPKAD
			KIB A s/d KIB E		ya	
			Permendagri No. 47 Tahun 2021		ya	
			Rekon 1 th sekali		ya	
			Rekapitulasi Barang ke Neraca		ya	
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	20,55	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	115,638	,,,,,,,,,,%	Dinas Kominfo
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	15,789	,,,,,,,,,,%	Dinas Kominfo

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Harapan Lama Sekolah	14,67
2.	Rata-rata lama sekolah	9,01
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,77%
4.	Angka Harapan Hidup	76,52
5.	Angka Kematian Ibu	52,78
6.	Angka Kematian Bayi	7,1
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.271,84

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	81,00
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68
13.	Indeks Rasa Aman	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	139,78
16.	Angka Kemiskinan	6,1
17.	Angka Pengangguran	3,05
18.	Nilai Investasi	8,79 T
19.	Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	82,72%
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Harapan lama sekolah	14,67	13,25	90,32
2.	Rata-rata lama sekolah	9,01	9,06	100,55
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,77%	87,87%	100,11%
4.	Angka Harapan Hidup	76,52	76,76	100,31
5.	Angka Kematian Ibu	52,78	88,24	32,82
6.	Angka Kematian Bayi	7,1	5,96	116,06
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.271,84	11.272,00	100
8	Indeks Reformasi Birokrasi	85	69,21	81,42
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,00	71,13	87,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Masih dalam proses	

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	88,31	105,76
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68	3,38	126,12
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,86	162,26
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	139,78	126,95	90,82
16.	Angka Kemiskinan	6,1	7,41	82,32
17.	Angka Pengangguran	3,05	3,21	95,02
18.	Nilai Investasi	8,79 T	10,30 T	117,18
18..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	82,72%	84,86	102,59
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56	54,88	82,45

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun dalam sebelumnya

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harapan Lama Sekolah	14,44	13,24	91,69	14,67	13,25	90,32
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70	8,76	100,69	9,01	9,06	100,55
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%	86,13%	98,39	87,77%	87,87%	100,11 %
4.	Angka Harapan Hidup	76,51	76,78	100,35	76,52	76,78	100,30
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	150,95	-54,68	52,78	88,24	32,82
6.	Angka Kematian Bayi	7,30	6,75	107,53	7,1	5,96	116,06
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.130,49	11.272,00	101,27	11.271,84	11.272,00	100
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00	67,52	85,46	85	69,21	81,42
9.	Nilai Akutabititas Kinerja	75,00	69,45	92,60	81,00	71,13	87,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dlm	

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	BPK)					proses	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	86,88	104,67	83,5	88,31	105,76
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83	2,68	3,38	126,12
13.	Indeks Rasa Aman	0,53	0,44	83,02	0,53	0,86	162,26
14.	Indeks Toleransi	100	91,67	91,67	100%	100%	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	134	126,65	94,51	139,78	126,95	90,82
16.	Angka Kemiskinan	6,21	7,60	81,71	6,1	7,41	82,32
17.	Angka Pengangguran	3,15	3,77	80,32	3,05	3,21	95,02
18.	Nilai Investasi	8,34 T	39,44 T	472,90	8,79 T	10,30 T	117,18
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	81,72	83,60	102,30	82,72%	84,86	102,59
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34	62,76	96,05	66,56	54,88	82,45

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Harapan lama sekolah	94,63	93,17	91,69	14,67	13,25	90,32	14,90	88,93
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	100,69	9,01	9,06	100,55	9,20	98,48
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	98,39	87,77%	87,87%	100,11%	88,00	99,85
4.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	100,35	76,52	76,78	100,30	76,54	100,31
5.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	-54,68	52,78	88,24	32,82	52,78	32,82
6.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	107,53	7,1	5,96	116,06	6,9	113,62
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	101,55	101,27	11.271,84	11.272,00	100	11.413,19	98,76
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	85,46	85	69,21	81,42	90	75,02
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	95,08	92,60	81,00	71,13	87,81	83	84,94

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses		WTP	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	104,67	83,5	88,31	105,76	85	107,70
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	98,83	2,68	3,38	126,12	2,87	117,77
13.	Indeks rasa aman	161,54	103,77	83,02	0,53	0,86	162,26	0,53	
14.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	91,67	100%	100%	100%	100 %	
15..	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	96,77	94,51	139,78	126,95	90,82	144,87	
16.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	81,71	6,1	7,41	82,32	5,90	79,62
17.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	80,32	3,05	3,21	95,02	2,90	90,34
18	Nilai Investasi	77,25	42,12	472,90	8,79 T	10,30 T	117,18	9,19 T	
19..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	103,06	102,30	82,72%	84,86	102,59	83,73%	101,35
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	96,05	66,56	54,88	82,45	67,77	80,98

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Harapan lama sekolah	94,63	93,17	14,44	13,24	91,69	14,67	13,25	90,32	14,90	88,93
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	8,70	8,76	100,69	9,01	9,06	100,55	9,20	98,48
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	87,54%	86,13%	98,39	87,77%	87,87%	100,12	88,00%	99,85
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	98,90	99,97			96,92			97,06		95,75

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 97,00%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,08% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 96,92%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 4,72 %

1. Harapan lama sekolah	$\frac{14,90 - 13,25}{13,25}$	x	=	-
		100%		12,45%
2. Rata-rata lama sekolah	$\frac{9,20 - 9,06}{9,06}$	x	=	-1,55%
		100%		
3. Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	$\frac{88,00 - 87,87}{87,87}$	x	=	-0,15%
		100%		
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023				-
				4,72%

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 90,32%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,37% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 91,69%, Realisasi Tahun 2022 sebesar 13,25 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 13,24 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 1,39%

Meningkatnya dari Realisasi Tahun 2022 sebesar 13,24 dengan realisasi sebesar 13,25 menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,25 tahun atau setara dengan D-2. Faktor yang mendukung realisasi ini adalah tersedianya lembaga pendidikan hingga kepedesaan meningkat sehingga akses masyarakat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2022 mengalami penurunan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2021 hal ini dikarenakan adanya pandemi yang belum berakhir sampai saat ini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,25 dibandingkan 12,93, maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 9,06 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP.

Meningkat dari target yaitu 9,01 dengan realisasi sebesar 9,06. Faktor yang mempengaruhi angka ini adalah partisipasi sekolah dimana tingkat atau fokus tertinggi yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat juga ijazah dari jenjang dari jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat.

Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (7,34)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Efektifitas tersebut karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara optimal sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

- c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2022 sebesar 100,12%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,41% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,39%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 87,87 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 86,13% mengalami kenaikan sebesar 1,74%.

Persentase Akses dari Mutu

Dari Target tahun lalu 2022 sebesar 87,77, Realisasi sebesar 87,87. Realisasi tersebut dipengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Presentase Sekolah atau lembaga terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan masyarakat.

Faktor yang mendukung APM adalah kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD hingga SMP Meningkatkan.

- Angka Kelulusan adalah kelulusan tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan oleh sekolah sehingga sekolah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk meluluskan siswa meski tetap berpedoman pada ketentuan nasional.
- Sekolah Atau Lembaga yang terakreditasi yang meningkat dipengaruhi jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat.

Program yang mendukung realisasi Presentase Akses dan Mutu adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

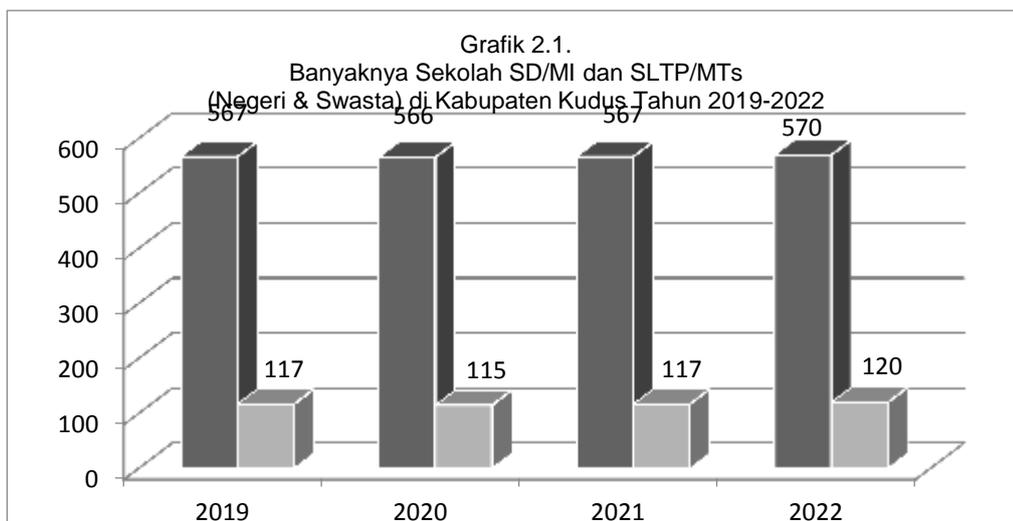
1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
4. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan

Penurunan target tersebut disebabkan karena faktor :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar.
- b. Akreditasi jenjang PAUD.
- c. Pendidikan Masyarakat perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan.

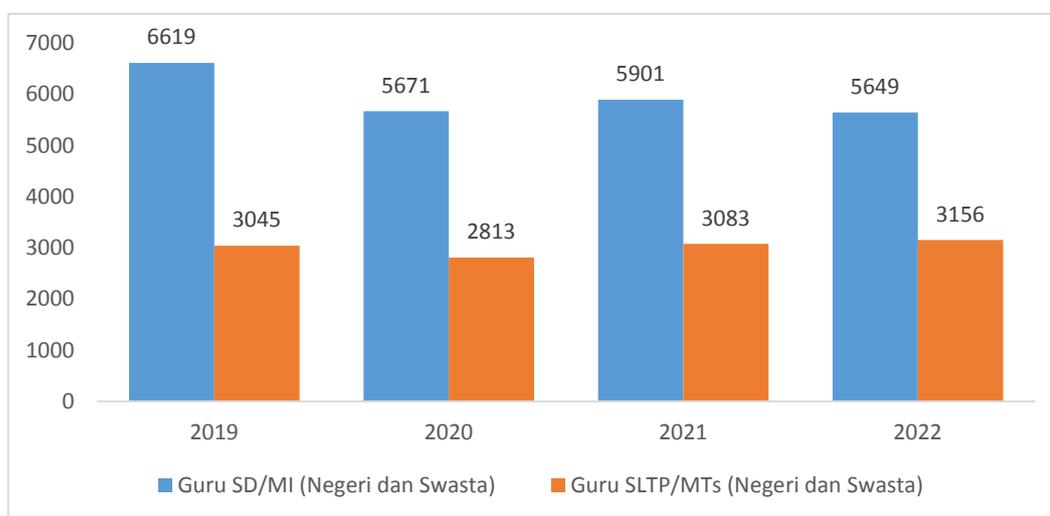
Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 97,00% atau Sangat tinggi

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus :



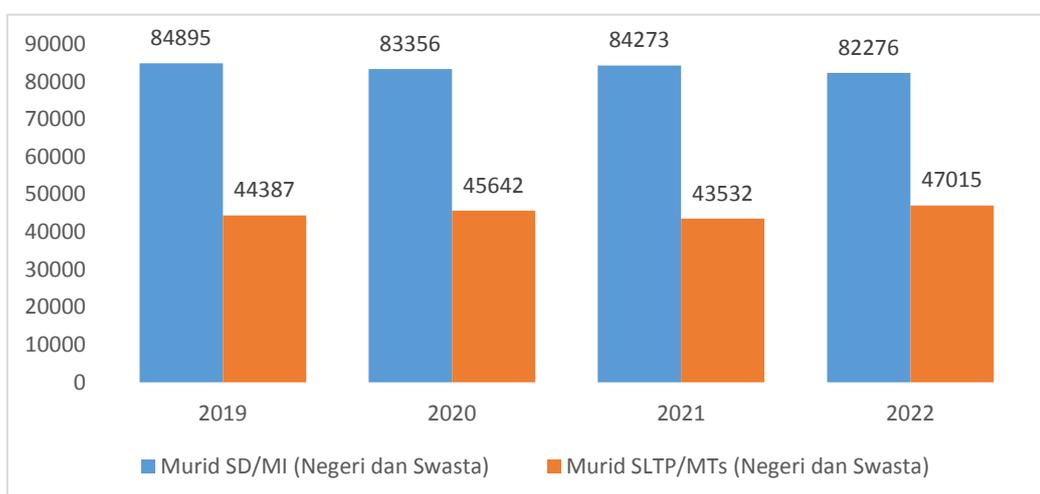
Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

Grafik 2.2
Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

Grafik 2.3
Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2022 – 2023 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2022/2023 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan 1.997 murid. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami kenaikan jumlah murid sebesar 3.483 murid.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2022/2023, tersedia jumlah SD sebanyak 424 unit dan MI sebanyak 146 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 52 dan 68 unit.

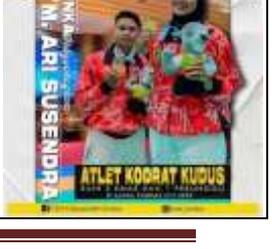
Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2022/2023 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), AKBID Mardi Rahayu, AKBID Penda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
1	Juara III Lomba Cipta Lagu Anak Kategori Naskah Lagu Anak Tingkat Provinsi	KB Ummi Halimatus sa'diyyah	2022	Chabibah A'yun	
2	Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 Tingkat Provinsi dalam bidang pendidikan	Organisasi Aksi Silidaritas Era Kabinet Indonesia Maju	2022	Yuyun Eka Susanti	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
3.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	2022	Felicia Joleen Harianto, SD Masehi Kudus	
4.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Peraih Medali Perak Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	2022	Lionel Wijaya, SD Cahaya Nur	
5.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	2022	Nararya Rafa Suryawirawan, SD 1 Barongan	
6.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	2022	Kayla Felisiana Istanti, SMP 1 Kudus	
7.	Juara I Lomba MAPSI SMP Tingkat Jawa Tengah	Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	2022	Vila Sofia, SMP TAHFIDH MA'HAD YASIN	
8.	Juara I Lomba MAPSI SMP Tingkat Jawa Tengah	Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	2022	Fikri Adnan Oktar, SMP 1 Bae	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
9.	Juara III Lomba MAPSI SMP Tingkat Jawa Tengah	Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah	2022	Tiara Najla Salsabila, SMP 1 Kudus	
10.	SEA Pencak Silat CHAMPIONSHIP SINGAPURA Peraih Medali Emas Tingkat Internasional	8 TH SOUTHEAST ASIA Pencak Silat CHAMPIONSHIP 2022	2022	Safira Dwi Meilani	
11.	19 TH WORLD Pencak Silat CHAMPIONSHIP 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Internasional	19 TH WORLD PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2022	2022	Safira Dwi Meilani	
12.	Kejurnas Memperingati HUT KE-10 RSPAU dr. S. Hardjolukito Di Yogyakarta dari Cabang Olahraga Pencak Silat Peraih Mendali Emas Tingkat Nasional	Kejurnas memperingati HUT KE-10 RSPAU dr. S. Hardjolukito Di Yogyakarta	2022	Yuris Februari K.	
13.	Invitasi Terbuka Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Meja KADET NASIONAL Tahun 2022 Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	Invitasi Terbuka Kejuaraan Tenis Meja KADET NASIONAL Tahun 2022	2022	Nabila Fikriyah	
14.	Kejurnas Bola Voli U-17 Peraih Juara III Tingkat Nasional	Kejurnas Bola Voli U-17	2022	TIM BOLA VOLI U-17	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
15.	Kejurnas Cabor Tenis Meja Manado 2022 Kategori Tunggal KADET Putri Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Kejurnas Tenis Meja Manado 2022 Kategori Tunggal KADET Putri	2022	Adisty	
16.	Kejurnas Cabor Tenis Meja Manado 2022 Kategori Beregu KADET Putra Peraih Medali Perak Tingkat Nasional	Kejurnas Tenis Meja Manado 2022 Kategori Beregu KADET Putra	2022	Fatah	
17.	PRA POPNAS ZONA III 2022 Peraih Medali Perak Tingkat Nasional	PRA POPNAS ZONA III 2022	2022	TIM BASKET PUTRI	
18.	POMNAS XVII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XVII TAHUN 2022	2022	Safira Dwi Meilani	
19.	POMNAS XVII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XVII TAHUN 2022	2022	Ammar Abdullah Dhani Arni Raihan	
20.	POSPENAS TAHUN 2022 Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	POSPENAS TAHUN 2022	2022	Irsalina Izzati	
21.	POMNAS XII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XII TAHUN 2022	2022	M. Ari Susendra (80-85KG)	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
22.	POMNAS XII TAHUN 2022 Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	POMNAS XII TAHUN 2022	2022	M. Ari Susendra (Gerak Getar Campuran)	
23.	POMNAS XII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XII TAHUN 2022	2022	Vinka Widyaningrum	
24.	Kejurnas Voli U-17 Peringkat III Tingkat Nasional	Kejurnas VOLI U-17	2022	TIM PUTRA	
25.	Kejurnas Senior Gulat Puan Maharani CUP 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Kejurnas Senior Gulat Puan Maharani CUP 2022	2022	Ahmad Umar Maulana	
26.	PASKIBRAKA Tingkat Nasional Tahun 2022	PASKIBRAKA Tingkat Nasional	2022	I Dewa Ayu Firsty Meita D	
27.	PASKIBRAKA Tingkat Jawa Tengah Tahun 2022	PASKIBRAKA Tingkat Jawa Tengah	2022	M. Franchy Luthfian R	

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2020	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	76,51	76,78	100,35	76,52	76,76	100,31	76,54	100,29
2.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	59,27	150,95	-54,68	52,78	88,24	32,82	52,78	32,82
3.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	7,30	6,75	107,53	7,1	5,96	116,06	6,9	113,62
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,68	72,89			51,07			83,06		82,24

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 83,06%. Angka tersebut kurang sebesar 31,99% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 51,07%

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Angka Harapan Hidup } \frac{76,54 - 76,52}{76,52} \times 100\% = -0,03\%$$

2. Angka Kematian Ibu	$\frac{52,78 - (88,24-52,78)}{52,78} \times 100\% = 32,82\%$
3. Angka Kematian Bayi	$\frac{6,90 - (7,10-6,90)}{6,90} \times 100\% = 97,10\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	43,30%

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2022 sebesar 100,31%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,04% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100,35%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 76,76 dipengaruhi oleh:

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 94,99 %
2. Cakupan pelayanan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 75,17%
3. Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan capaian kinerja 96,73%

apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 76,78 telah mengalami penurunan sebesar 0,02

Faktor pendukung keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2022 adalah :

1. Pembentukan satgas covid 19
2. Penerapan prokes dalam semua aspek
3. Penerapan PHBS dalam Perilaku
4. Penguatan germas di lingkungan keluarga
5. Penguatan kegiatan testing, tracing, dan treatment
6. Optimalisasi Vaksin, logistik
7. Peningkatan kapasitas petugas (SDM).

Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

- 1) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/ KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.

- 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2022 sebesar 32,82%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar -54,68%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 88,24 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 150,95 Permasalahan/penyebab penurunan luring signifikan pada pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2022 karena (10) sepuluh kematian terbanyak penyebabnya karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu Pre eklamsia, eklamsia, penyakit jantung bawaan dan 1 terkonfirmasi covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar.

Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2022 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia, SLE, hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemi covid-19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood pilar yaitu penguatan “Keluarga

Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

- 1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
- 2) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
- 4) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapaian target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2021 penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi

covid 19 sebanyak 17 kasus yaitu 80,95%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 19,05 % karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu pre eklamsi , ekamsi, penyakit jantung bawaan dan TBC.

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Satgas Covid 19.
2. Penguatan puskesmas dan jaringannya
3. Penguatan manajemen program
4. Peningkatan peran serta masyarakat
5. Penguatan kerjasama dan kemitraan
6. Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara Optimalisasi aplikasi Si BULAN dalam rangka percepatan system
7. Audit Kematian Ibu
8. Edukasi tentang 5 M, screening covid pada ibu hamil dengan rapid antigen

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Bayi tahun 2022 sebesar 116,06%. Angka tersebut kurang sebesar 2,44 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 113,62%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kematian bayi di Kabupaten Kudus sejumlah 106 bayi dari total kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13.600 bayi x 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi Tahun 2022 sebesar 5,96 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 6,9 mengalami kenaikan sebesar 0,94

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi sebanyak 106 kasus :

1. Asfiksia sebanyak 20% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 26% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 11% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.
4. Terkonfirmasi covid 19 dan lainnya sebanyak 43%

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui

kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.

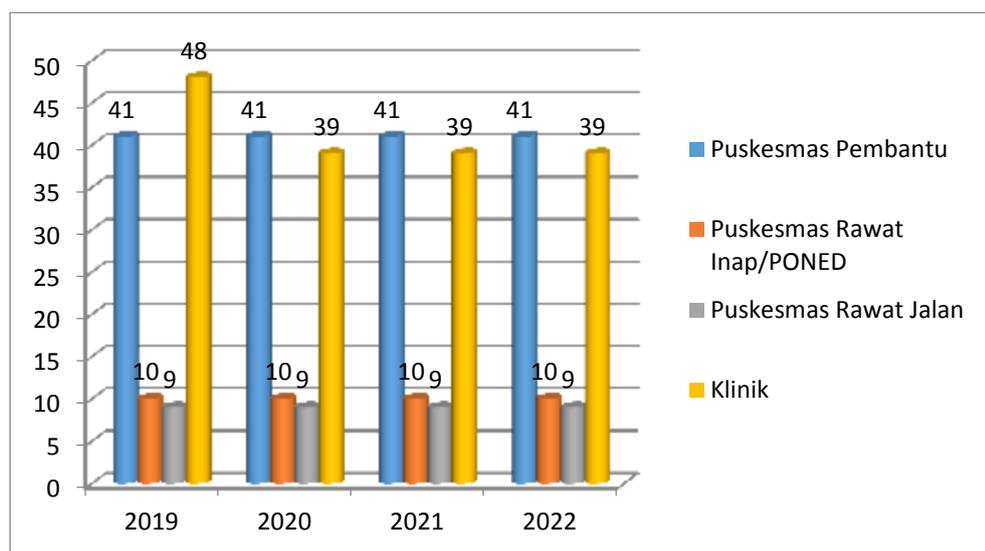
Keberhasilan menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 dilaksanakan melalui :

1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 83,06% atau Tinggi

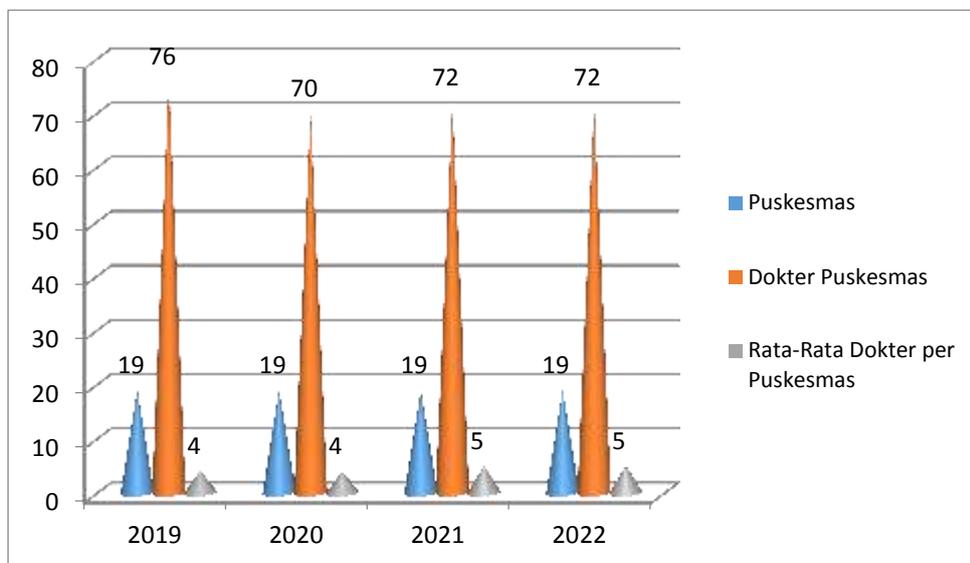
Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Grafik 2.4
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022



Sumber data : DKK Tahun 2022

Grafik 2.5
Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas
di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : DKK Tahun 2022

Pada tahun 2022 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna.

3. Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2020	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	101,55	11.130,49	11.272,00	101,27	11.271,84	11.272,00	100	11.413,19	98,75
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,33	101,56			101,27			100		98,75

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 100%. Angka tersebut kurang sebesar 1,27% dari capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 101,27%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 1,25 %

$$1. \text{ Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita} \quad \frac{11.413,19 - 11.272,00}{11.272,00} \times 100\% = -1,25\%$$

Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023 -1,25%

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2022 sebesar 100%. Angka tersebut kurang sebesar 1,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 101,27%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 11.272,00 sama dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 11.272,00.

Realisasi sebesar 100 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi

sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarakat

Masih diterapkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat akibat pandemic covid19 pada tahun 2022, kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat per kapita justru terjadi peningkatan. Salah satu factor yang mempengaruhi adalah, dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, maka keinginan untuk melakukan aktivitas konsumtif dalam rumah justru semakin meningkat, apalagi didukung dengan semakin mudahnya layanan belanja via online.

Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2022 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena faktor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100 % atau **Sangat Tinggi**

4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	79,00	67,52	85,47	85,00	69,21	81,42	90	76,90
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	95,08	75,00	69,45	92,60	81,00	71,13	87,81	83	85,70
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses		WTP	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	83,00	86,88	104,67	83,5	88,31	105,76	85	103,89
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	2,56	2,53	98,83	2,68	3,38	126,12	2,87	117,77
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	102,32	104,58			95,39			115,94		110,83

Sumber data :RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 115,94%. Angka tersebut melampaui sebesar 20,55% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 95,39%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 7,01 %

1. Indeks Reformasi Birokrasi	$\frac{90,00 - 69,21}{69,21} \times 100\% = -30,04\%$
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	$\frac{83,00 - 71,03}{71,03} \times 100\% = -16,85\%$
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP x 100% = WTP
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{85,00 - 88,31}{88,31} \times 100\% = 3,75\%$
5. Indeks Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$\frac{2,87 - 3,38}{3,38} \times 100\% = 15,09\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	-7,01%

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar 81,42% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,05% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 85,47%.

Dalam Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi focus perubahan. Sebagai dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut diantaranya yaitu:

- 1) Telah meningkatkan upaya perbaikan pada komponen hasil seperti terkait Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang ditandai dengan peningkatan nilai IPKP Tahun 2022 sebesar 91,10 dari KemenPAN RB dan IPAK Tahun 2022 sebesar 85,31 dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Pemerintah Kabupaten Kudus yang cukup signifikan
- 2) Telah meningkatkan upaya perbaikan pada komponen hasil antara, yang dapat terlihat dengan peningkatan pada beberapa komponen penilaian serta terdapat penilaian komponen yang baru dilakukan pada tahun 2022;
- 3) Telah meningkatkan upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditandai dengan adanya kenaikan predikat dari B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik);
- 4) Terhadap rekomendasi dari Kemenpan RB tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut ;
 - Pelaksanaan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK yang dilanjutkan dengan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap Core Value sebagai monev di tiap Perangkat Daerah;
 - Meningkatkan penerapan manajemen SPBE dengan penyusunan arsitektur SBPE dan peta rencana SPBE Kabupaten Kudus, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE, dan sosialisasi digitalisasi layanan dan integrasi aplikasi pada seluruh PD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

peningkatan Indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kudus dari 2,53 menjadi 3,38;

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aplikasi yang ada sebagai control dalam kualitas pemanfaatan aplikasi. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari Kemen Pan RB.
- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 sebesar 87,81% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,79% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 92,60%.

Tahun 2022 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 6 Desember 2022 dari KemenPAN RB. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan reuiu terhadap sebagian besar rumusan tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja utama level PD dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draft IKU terbaru, namun belum diformalkan dan disesuaikan sampai ke dokumen perencanaan lainnya seperti PK;
2. Peningkatan pemanfaatan aplikasi e-planning sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara bulanan oleh pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan menyajikan pengukuran indikator yang disandingkan dengan realisasi anggaran hingga ke level sub kegiatan;
3. Dalam peningkatan kualitas evaluasi internal, Inspektorat telah berupaya melalui berbagai upaya seperti :
 - Pembahasan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dengan tiap PD terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi;
 - Pelaporan hasil evaluasi SAKIP kepada Bupati dan Sekretaris Daerah untuk mendorong PD agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;

- Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus telah mengirimkan surat kepada seluruh PD perihal implementasi SAKIP agar PD berkomitmen untuk perbaikan SAKIP termasuk juga Bappeda dan Bagian Organisasi untuk memantau tindak lanjut hasil evaluasi;
 - Pelaksanaan diklat teknis penyusunan dokumen perencanaan yang diikuti oleh seluruh PD dalam rangka peningkatan kapasitas aparat perencana.
- c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2022 sebesar Masih dalam proses dari BPK.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan Tahun 2022 sudah 10 (sepuluh) kali dengan hasil WTP.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 sebesar 105,76% Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,09% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 104,67%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 88,31 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 86,88

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil rata-rata pencapaian 88,31% dengan katagori Baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
- Telah dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka partisipasi masyarakat untuk perbaikan layanan publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
- Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik yang dilaksanakan serentak mulai triwulan 1 s.d triwulan IV;
- Dilaksanakan evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap 5 Perangkat Daerah dan 2 Unit kerja dengan nilai 92,87 berkategori Zona hijau kategori kualitas tertinggi.

- e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 sebesar 126,12%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 27,29% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,83%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 3,38 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 2,53.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Untuk memetakan kondisi implementasi e-government secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE.

Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai nilai sebesar 3,38 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022

Nama Indeks	Nilai			
	2019	2020	2021	2022
SPBE	2,73	3,08	2,53	3,38
Domain Kebijakan SPBE	2,53	3,12	2,30	3,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,29	3,43	2,30	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	1,90	3,00
Perencanaan Strategi SPBE	2,14	2,43	1,75	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,00	2,50	3,50
Penyelenggara SPBE	2,5	3,00	1,00	2,50
Domain Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,36
Penerapan Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,75
Audit TIK	2,33	2,33	1,00	1,33
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39	3,49	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43	3,70	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33	3,17	4,00

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE mengalami kenaikan nilai. Jika dibandingkan evaluasi pada tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan hanya 0,33 point, tahun 2022 komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ini ditandai dengan dikeluarkannya Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus.

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE tersebut, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Masih belum optimalnya kinerja tim pengarah SPBE
2. Belum tersusunnya rencana induk SPBE yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE
3. Belum memiliki kebijakan proses bisnis terintegrasi
4. Masih ada beberapa layanan yang belum terdigitalisasi
5. Belum adanya tata kelola untuk integrasi aplikasi sehingga masih banyak aplikasi yang dikembangkan secara parsial

Solusi :

1. Perlunya kejelasan rincian tugas tim pengarah dan perlu diagendakan pertemuan rutin dengan tim pengarah SPBE

2. Perlunya menyusun rencana induk SPBE yang memuat sasaran SPBE, kebijakan dan strategi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE
3. Perlunya memotret kondisi eksisting dan kebutuhan layanan administrasi maupun layanan publik yang ada di Kabupaten Kudus dan menyusun peta jalan pembangunan dan pengembangan aplikasi
4. Perlunya menyusun dokumen integrasi dan tata kelola aplikasi

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100,28% atau Sangat tinggi.

5. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks rasa aman	161,54	103,77	0,53	0,44	83,02	0,53	0,86	162,26	0,53	162,26
2.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	100	91,67	91,67	100%	100	100%	100	100%
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	130,77	97,72			87,35			131,13		131,13

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2022 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 131,13%. Angka tersebut melebihi sebesar 43,78% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 87,35%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui 18,88 %

1. Indeks Rasa aman	$\frac{0,53 - 0,86}{0,53} \times 100\% = -62,26\%$
2. Indeks Toleransi	$\frac{100 - 100}{100} \times 100\% = 100,00\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	18,88%

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2022 sebesar 162,26%. Angka tersebut melebihi sebesar 79,24% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 83,02%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,86 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 0,44 mengalami penurunan sebesar 0,42 dan angka tersebut juga telah sama terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 162,26%.

Perhitungan Indeks Rasa Aman Tahun 2022.

- Jumlah Penanganan Tibum	= 1.903
- Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	= 59
- Jumlah Penanganan Kebakaran	= 66
TOTAL	= 2.028

$$\begin{aligned} \text{Indeks rasa aman} &= \frac{\text{Jumlah Penanganan Gangguan Tibum Tranmas x Luas wilayah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{2.028 \times 364}{857415} = 0,86\% \end{aligned}$$

Analisis terkait indeks rasa aman

Faktor yang mendukung tidak tercapainya indeks rasa aman :

- Karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berdampak pada terjadinya PHK.
- Berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat cenderung mengambil jalan pintas pada kegiatan-kegiatan informal yang melanggar.

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
 2. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
 3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba (P4GN).
 4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi tahun 2022 sebesar 100%. Angka tersebut melebihi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 91,67%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 91,67%,

Pencapaian indeks toleransi tahun 2022 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh :

1. Prosentase potensi konflik agama yang tertangani 75%
2. Prosentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%
3. Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\text{Indeks toleransi} = \frac{\% \text{ potensi konflik sosial} + \% \text{ potensi gangguan keamanan} + \% \text{ konflik sara}}{3}$$

$$= \frac{100+100+100}{3} = 100\%$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian Indeks Toleransi di Kabupaten Kudus adalah :

1. Peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan/ Organisasi Kemasyarakatan baik yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan/inisiatif dari masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang peduli terhadap toleransi.
Contoh : FKUB, FPBI, MUI, Dewan Gereja Indonesia dll
2. Tersedianya regulasi yang mengatur toleransi umat beragama salah satunya yang mengatur tentang SOP Pendirian Rumah Ibadah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan penganut kepercayaan.
4. Meningkatnya kehadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA melalui sosialisasi dan mediasi-mediasi penyelesaian permasalahan intoleransi.

Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 131,13% atau **Tinggi**.

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
		Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjayang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	96,77	134	126,65	94,51	139,78	125,95	90,11	144,87	86,94
2.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	6,21	7,60	81,71	6,10	7,41	82,32	5,90	79,62
3.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	3,15	3,77	80,32	3,05	3,21	95,02	2,90	90,34
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,93	71,09			85,51			89,15		85,53

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 89,15%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 3,64% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 85,51%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 1,43 %

1. PDRB Per Kapita (Juta rupiah)	$\frac{144,87 - 125,95}{125,95} \times 100\% = -15,02\%$
2. Angka Kemiskinan	$\frac{5,90 - 7,41}{7,41} \times 100\% = 20,38\%$
3. Angka Pengangguran	$\frac{2,90 - 3,21}{3,21} \times 100\% = -9.66\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	-1,43%

2) Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2022 sebesar 90,11%. Angka tersebut menurun sebesar 4,40% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 94,51%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 126,95 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 126,65.

Realisasi sebesar 126,95 juta rupiah adalah dari : PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 126,95 Juta rupiah diperoleh dari perhitungan jumlah PDRB Kabupaten Kudus menurut harga berlaku sebesar 108.214,90 juta rupiah dibagi oleh jumlah penduduk sebesar 857.415 jiwa.

Faktor yang mendukung keberhasilan PDRB Per Kapita Pada tahun 2022, jumlah PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar -1,98 persen sesuai dengan harga konstan. Sedangkan jika dihitung dengan harga berlaku PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sekitar -1,2 persen. Meski demikian tingkat PRDB per Kapita Kabupaten Kudus mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen atau sekitar 7 Juta per penduduk. Faktor mempengaruhi tingkat PDRB dikabupaten Kudus disebabkan oleh adanya perlambatan jumlah penduduk. Selain itu, mulai bergairahnya dunia perekonomian daerah, memberikan angin bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet usaha mereka sehingga diterima oleh pasar dengan Pasar Kudus.

Program yang mendukung untuk meningkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain :

1. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan

2. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
 3. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
 4. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 5. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
 6. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar 82,32%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,61% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 81,71%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 7.41 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 7,60 mengalami kenaikan sebesar 0,19 (angka yang tidak diharapkan).

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk Tahun 2022 batas garis kemiskinan adalah sebesar 482.806 rupiah ber jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan angka kemiskinan :

Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 kembali menurun dari kondisi tahun sebesar 7,60 persen menjadi 7,41 persen. Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah SDIT dan lainnya

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkatkan pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
 3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social
- c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2022 sebesar 95,02 Angka tersebut telah melampaui

sebesar 14,70 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 81,71%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 3,21 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 3,77 turun sebesar 0,56.

Realisasi sebesar 3,21 adalah dari Perhitungan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Anggaran KerJa}} \times 100\% \\ &= \frac{15.800}{492.030} \times 100\% \\ &= 3,21 \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi menurunnya angka pengangguran adalah

- Potensi ekonomi sudah mulai membaik setelah pandemi, perekonomian berangsur membaik yang didukung adanya peningkatan permintaan pasar, dunia usaha mulai melakukan usahanya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
- Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
- Adanya kebijakan Pemerintah mempermudah perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten kudas mencapai 66.060 jiwa berkurang sebanyak 1.000 jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 67.060 jiwa.

Garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari 450.992 pada tahun 2021 menjadi 482.806 pada tahun 2022. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2022 sebesar 3,21%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022 dengan Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan mengembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan ketrampilan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembangunan kawasan transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan Job Fair.

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 2,36% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 5,86% Kabupaten Kudus masih tetap lebih baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 89,15% atau **Tinggi**.

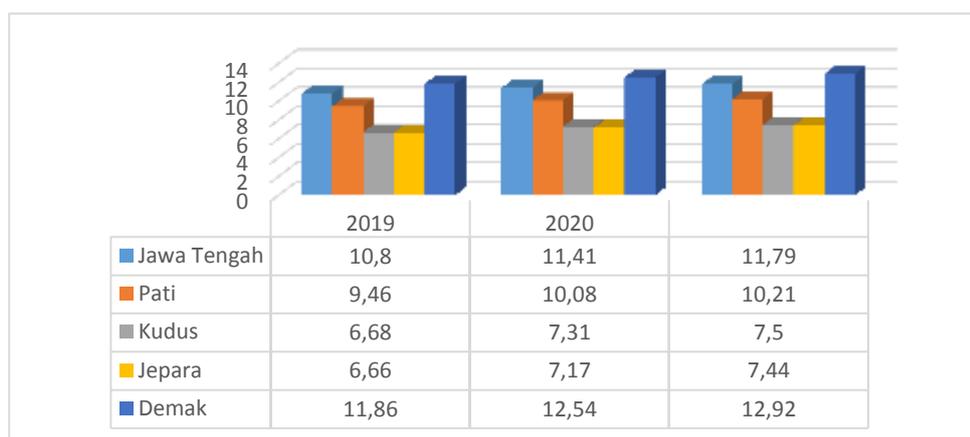
Tabel 2.13
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060	66.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,60	7,41
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429 666	450.922	482.806
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23	
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27	

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2022 (rilis maret 2022)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 2.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2019-2021



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2021

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun n x 1.05 (n+1) dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Nilai Investasi	77,25	42,12	8,34 T	39,44 T	472,90	8,79 T	10,30 T	117,18	9,19 T	112,08
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	77,25	42,12			472,90			117,18		112,08

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMPSTP Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 117,18%. Angka tersebut kurang sebesar 355,72% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 472,90%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 kelampaui sebesar 10,78 %

$$1. \text{ Nilai Investasi} \quad \frac{9,19 \text{ T} - 10,30 \text{ T}}{10,30 \text{ T}} \times 100\% = 10,78\%$$

$$\text{Rata-rata persentase (\%)} \quad \text{terhadap akhir RPJM 2023} \quad 10,78\%$$

2) Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2022 sebesar 117,18%. Angka tersebut kurang sebesar 355,72% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 472,90%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 10,30 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 39,44 T mengalami penurunan sebesar 29,11T

Upaya-upaya yang ditempuh melalui :

- a. Sosialisasi OSS versi RBA kepada para pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial dan tatap muka.
- b. Melakukan Promosi Penanaman Modal melalui Media Cetak dan media cetak (Surat Kabar).
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha dalam memberikan pemahaman dan tanggung jawabnya dengan melakukan pelaporan LKPM

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2022 yaitu :

- a. Program Promosi Penanaman Modal
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 117,18% atau Sangat Tinggi

8. Meningkatkan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase. Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	103,06	81,72	83,60	102,30	82,72	84,86	102,59	83,73%	101,35
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,26	103,06			102,30			102,59		101,35

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKJP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 102,59%. Angka tersebut naik sebesar 0,28% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 102,30%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 kelampaui sebesar 0,86 %

$$1. \text{ Persentase (\%) infrastruktur dalam kondisi mantap} \quad \frac{83,73 - 84,86}{84,86} \times 100\% = 0,86\%$$

Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023 0,86%

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2022 sebesar 102,59%. Angka tersebut naik sebesar 0,28% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 102,30%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 84,86 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 83,60

Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2022 di Kabupaten Kudus tercapai sebesar 84,86% dipengaruhi oleh :

- Prosentase Jalan dalam kondisi mantap 93,34%
 - Prosentase Jembatan dalam kondisi mantap dan sedang 91,06%
 - Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik 90,02%
 - Prosentase Panjang saluran Drainase perkotaan dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat 65,00%
- Jumlah 339,42%

Realisasi Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap adalah:
339,42% : 4 = 84,86%

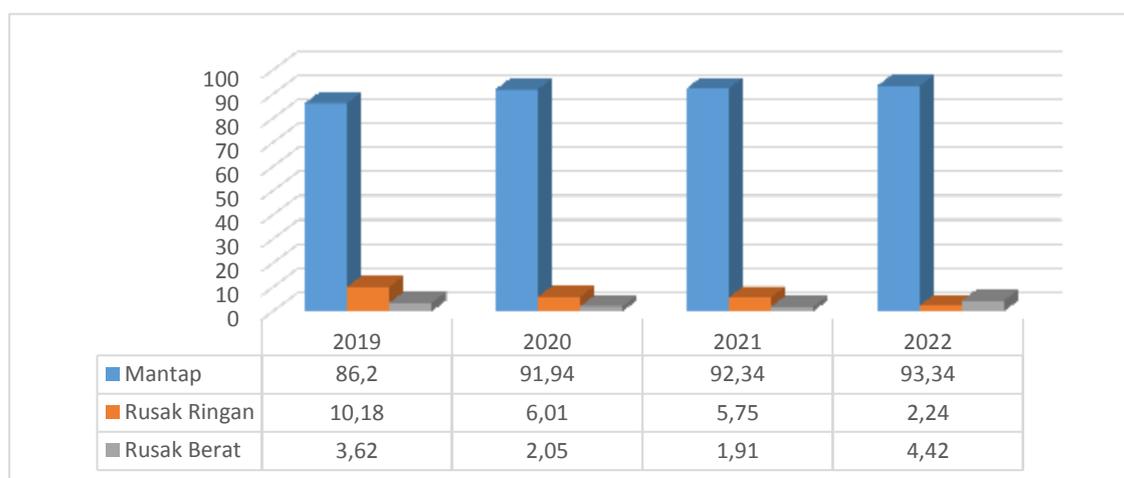
Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.16
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus
Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2022

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
1	Mantap	86,20	91,94	92,34	93,34
2	Rusak ringan	10,18	6,01	5,75	2,24
3	Rusak berat	3,62	2,05	1,91	4,42

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Grafik 2.7.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2022



Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7.20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jembatan Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.17
Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2022

No.	Kondisi Jembatan	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Baik	unit	208	312	312	181
		%	58,43	87,64	87,64	42,59
2.	Sedang	unit	106	9	9	206
		%	29,78	2,53	2,53	48,47
3.	Rusak	unit	42	35	35	38
		%	11,80	9,83	9,83	8,94
JUMLAH		<i>unit</i>	356	356	356	425

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan

daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2022

No	Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40	9.049,40	9.268,40
		%	86,28	87,64	87,90	90,02
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00	513,00	640,00
		%	7,76	7,76	4,98	6,22
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00	733,00	387,00
		%	4,98	4,98	7,12	3,76
4	Rusak Berat	Ha	100,50	-	-	-
		%	0,98	-	-	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.295,40	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.295	10.295	10.295
		%	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Saluran drainase tahun 2018 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2018 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang 108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2022 Panjang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 592.692,25 meter dengan kondisi baik 44,28 % (262.437,75 m), Kondisi sedang 20,72% (122.810,00 m) sedangkan kondisi rusak 35,00% (207.444,50 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2021 adalah sebesar 64,00 % sedangkan Tahun 2022 adalah sebesar 65,00 % persentase ada peningkatan.

Tabel 2.19
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03	64,00	65,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah :

1. Upaya penanganan Kondisi Infrastruktur rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Kudus
2. Penyusunan perencanaan rehabilitasi infrastruktur untuk tahun yang akan datang sesuai dengan skala prioritas.
3. Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang berdampak pada beban dan kapasitas yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratraktur :

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2021 adalah sebesar 98,25 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi

Tabel 2.20
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten
Kudus Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03	98,00	98,25
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2024. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Kudus sampai pada 2021 telah tersusun 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten. Selain penyusunan rencana rinci, pada tahun 2017 hingga tahun 2022 telah dilaksanakan Revisi Dokumen RTRW Kabupaten Kudus. Cakupan pelayanan ketaatan penataan ruang di Kabupaten Kudus selalu 100% setiap tahunnya. Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas tanah bersertikat di tahun 2021 yaitu 80,00 % sedangkan target di tahun 2022 persentase luas tanah bersertikat 73,19 % capaian 80,78 % target terlampaui sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70	42.516,00	
2	Luas tanah Bersertipikat HGB	ha	776,22	740,5199	714,00	
3	Persentase luas tanah Bersertipikat HGB	ha	1,83	1,74	2,00	
4	Luas tanah Bersertipikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167	5.417,00	
5	Persentase luas tanah	ha	5,40	8,48	13,00	

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
	Bersertipikat HP					
6	Luas tanah Bersertipikat HM	ha	28.662,38	27.401,22 64	27.812,00	
7	Persentase luas tanah Bersertipikat HM	ha	67,42	64,45	65,00	
8	Luas tanah Bersertipikat HW	ha	41,82	62,0062	84,00	
9	Persentase luas tanah Bersertipikat HW	ha	0,10	0,15	0,2	
10	Total Luas tanah Bersertipikat	ha	31.777,29	31.810,669 7	34.027	
11	Persentase luas tanah Bersertipikat	ha	74,74	74,80	80,00	80,78

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penyelenggaraan Jalan.
8. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
10. Program Penatagunaan Tanah.
11. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/ profesionalismenya.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.

3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

Strategi untuk peningkatan infrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahanan aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,59 % atau **Sangat tinggi**

9.Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan

Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	65,34	62,76	96,05	66,57	54,88	82,45	67,77	80,98
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,22	100,84			96,05			82,45		80,98

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 82,45%. Angka tersebut turun sebesar 13,60% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 96,05%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang sebesar 23,49 %

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 sebesar 82,45%. Angka tersebut kurang sebesar 13,60% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 96,05%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 54,88 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 62,76 mengalami penurunan sebesar 7,88 dan angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,47% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 80,98%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2022 dipengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 47,00 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%

2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 79,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 58,90 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	43,75	37,60%	16,45%
2.	Indeks Kualitas Udara	79,63	40,50%	32,25%
3.	Indeks Tutupan Lahan	28,22	21,90%	6,18%

Dengan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Bobot} \times \text{IKA}) + (\text{Bobot} \times \text{IKU}) + (\text{Bobot} \times \text{ITL}) = \text{Realisasi}$$

$$(37,60\% \times 43,75) + (40,50\% \times 79,63) + (21,90\% \times 28,22) = 54,88$$

Faktor yang menyebabkan kegagalan tidak tercapainya kinerja IKLH Kabupaten Kudus Tahun 2022

1. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan target IKA yaitu adanya pandemic Covid 19 dimana Kabupaten Kudus mengalami dampak besar pada awal dan pertengahan Tahun 2022, sehingga mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Perilaku pemenuhan protokol kesehatan berupa mencuci tangan pakai sabun mempengaruhi kualitas air permukaan di Kabupaten Kudus, sehingga menurunkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022.
2. Faktor yang yang menjadi penghambat indeks kualitas udara adalah dengan adanya pandemi covid-19 mempengaruhi perilaku menjaga jarak dengan orang lain, berpengaruh terhadap pilihan moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas masyarakat. Masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi selama masa pandemic untuk menghindari berdekatan dengan orang lain dalam satu moda transportasi individu menyebabkan penurunan kualitas udara sehingga berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022.

Program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IKLH :

1. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi penurunan kualitas air yaitu melaksanakan pengawasan secara rutin kepada pemilik persetujuan lingkungan dan segera menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan.

2. Upaya dilaksanakan untuk mengurangi menurunkan kualitas udara yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemilik persetujuan lingkungan.
3. Upaya untuk peningkatan Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan melaksanakan penanaman pohon dilahan Tahura untuk konservasi lahan kritis.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan

Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 82,45% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimanan tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			% capaian Tahun 2020	% capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	Indeks Kualitas Air	50,85	43,75	86,03%	100,02%	97,07%	50,85	92,43%
2	Indeks Kualitas Udara	93,92	79,63	84,78%	100,07%	86,86%	93,92	84,61%
3	Indeks Tutupan Lahan	60,85	28,22	40,37%	102,27%	99,67%	60,85	95,69%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Indeks kualitas air

Angka capaian Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 86,03%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 43,75 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 47,00 mengalami penurunan sebesar 3,25 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 6,39% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,43%. Indeks kualitas udara.

Angka capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 84,78%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 79,63 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 86,86 mengalami penurunan sebesar 7,23 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 0,17% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 84,61%. Indeks tutupan lahan.

Angka capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 40,37%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 28,22 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 58,23 mengalami penurunan sebesar 30,01 dan angka tersebut mengalami penurunan sebesar 55,32% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,69%.

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO₂ dan angka 20 untuk SO₂.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO₂ dan SO₂.

Efektifitas dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 82,45% atau kategori **tinggi**.

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 3.066.454.926.512,- untuk 120 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 2.408.590.117.353,-

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata lama sekolah • Persentase (%) akses dan mutu pendidikan 	Pengelolaan Pendidikan	74,16%	74,16%	197.021.608.078	187.360.104.708	95,10%	4,90%
			Pengendalian Perijinan Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000	43.425.000	57,90%	42,10%
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	95,00%	95,00%	3.124.450.159	3.033.234.942	97,08%	2,92%
			Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	92,00%	92,00%	13.539.501.170	13.386.332.702	98,87%	1,13%
			Pembinaan Perpustakaan	8,70%	1,69%	30.950.000	30.829.000	99,61%	0,39%
			Pengelolaan arsip	22,58%	16,28%	330.512.882	300.189.351	90,83%	9,17%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup • Angka Kematian Ibu • Angka Kematian Bayi 	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00%	100,00%	95.003.998.344	65.560.027.047	69,01%	30,99%
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	92,30%	92,30%	809.200.300	592.406.911	73,21%	26,79%
			Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	91,30%	91,30%	384.158.665	228.353.600	59,44%	40,56%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	1.253.305.800	1.060.967.418	84,65%	15,35%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00%	100,00%	385.587.076.909	309.524.135.510	80,27%	19,30%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100,00%	61,54%	2.197.500.000	917.500.084	41,75%	58,25%
			Pemberdayaan Sosial	85,00%	85,00%	161.999.920	153.994.698	95,06%	4,94%
			Rehabilitasi Sosial	30,47%	43,69%	2.004.881.090	1.894.855.903	94,51%	5,49%
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	41,36%	46,49%	87.442.547.300	86.273.620.600	98,66%	1,34%
			Penangan bencana	100,00%	100,00%	56.999.030	37.706.000	66,15%	33,85%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	100,00%	55.566.000	45.244.840	81,43%	18,57%
			Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	87,00%	92,00%	649.999.411	483.627.900	74,40%	25,60%
			Perlindungan perempuan	100,00%	100,00%	24.998.236	17.214.500	68,86%	31,14%
			Pengelolaan sistem data gender dan anak	85,80%	85,80%	9.999.280	6.204.800	62,05%	37,95%
			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,00%	100,00%	239.999.200	223.338.440	93,06%	6,94%
			Perlindungan khusus anak	100,00%	100,00%	86.277.100	48.602.700	56,33%	43,67%
			Pengendalian penduduk	100,00%	100,00%	170.075.000	62.475.062	36,73%	63,27%
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	85,00%	75,05%	4.461.711.000	2.634.057.398	59,13%	40,87%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	13,30%	15,69%	3.862.546.800	683.761.950	17,70%	82,30%
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00%	107,00%	3.009.941.740	3.009.136.000	99,97%	0,03%
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100,00%	107,00%	508.599.800	494.542.385	97,24%	2,76%
			Penanganan kerawanan pangan	95,00%	100,00%	15.000.000	11.161.740	74,41%	25,59%
			Pengawasan Keamanan Pangan	89,00%	86,50%	19.999.810	17.121.950	85,61%	14,39%
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	98,90%	98,90%	503.599.654	491.103.140	97,52%	2,48%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	98,90%	98,90%	61.199.750	54.579.880	89,18%	10,82%
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	98,52%	102,10%	10.000.000	9.975.000	99,75%	0,25%
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98,52%	102,10%	8.425.204.082	8.124.057.660	96,43%	3,57%
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	95,24%	86,01%	937.541.720	804.305.790	85,79%	14,21%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	98,52%	102,00%	222.850.000	218.228.116	97,93%	2,07%
			Penyuluhan Pertanian	98,52%	102,00%	1.319.863.352	1.161.955.484	88,04%	11,96%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Reformasi Birokrasi • Nilai Akutabilitas Kinerja • Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Indeks Kepuasan Masyarakat 	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85 Nilai	69,21 Nilai				
				81 Nilai	71,13 Nilai				
				WTP	WTP				
				2,68 Indeks	3,38 Indeks				
				83,5 Indeks	88,31 Indeks				
			Pendaftaran penduduk	100,00%	98,26%	2.409.296.820	2.229.341.539	92,53%	7,47%
			Pelayanan pencatatan sipil	100,00%	98,49%	912.713.383	874.732.176	95,84%	4,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100,00%	100,00%	932.929.760	858.036.129	91,97%	8,03%
			Pengembangan Kebudayaan	67,00%	108,00%	1.114.999.470	1.035.366.561	92,86%	7,14%
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	19,00%	48,00%	110.099.628	102.064.400	92,70%	7,30%
			Pengelolaan Permuseuman	19,00%	48,00%	3.815.799.882	3.797.548.044	99,52%	0,48%
			Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	8,00%	8,00%	3.900.248.219	3.821.950.762	97,99%	2,01%
			Pemasaran Pariwisata	14,00%	14,00%	1.625.000.000	1.283.678.250	79,00%	21,00%
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	5,00%	5,00%	15.000.000	14.580.000	97,20%	2,80%
			Penataan desa	3 desa	3 desa	1.702.068.990	1.442.722.185	84,76%	15,24%
			Peningkatan kerjasama desa	1 produk hukum kawasan perdesaan	1 produk hukum kawasan perdesaan	99.999.960	87.810.700	87,81%	12,19%
			Administrasi pemerintahan desa	20,00%	20,00%	2.843.966.955	2.233.252.004	79,53%	20,47%
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	75,00%	75,00%	695.737.730	597.465.150	85,88%	14,12%
			Kepegawaian Daerah	85,60%	75,60%	4.068.816.140	3.077.716.550	75,64%	24,46%
			Pengembangan sumber daya manusia	7,20%	6,70%	1.240.087.340	849.631.620	68,51%	31,49%
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	2.832.266.820	2.317.934.206	81,84%	18,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	322.440.000	298.981.399	92,72%	7,28%
			Penelitian dan pengembangan daerah	86,00%	86,00%	335.670.000	321.293.673	95,72%	4,28%
			Pengelolaan keuangan daerah	100,00%	100,00%	289.212.262.745	278.011.715.804	96,13%	3,87%
			Pengelolaan barang milik daerah	95,00%	99,94%	3.515.054.930	3.341.050.859	95,05%	4,95%
			Pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	96,10%	2.287.512.735	2.144.408.498	93,74%	6,26%
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00%	88,95%	37.519.907.000	20.654.865.131	55,05%	44,95%
			Penyelenggaraan pengawasan	100,00%	100,00%	454.347.180	279.910.250	61,61%	38,39%
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	95,00%	95,00%	690.337.900	457.101.549	66,21%	33,79%
			Informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	11.770.472.985	11.535.654.177	98,01%	1,99%
			Aplikasi informaiika	2,70 indeks	3,49 indeks	2.748.160.988	2.512.901.277	91,44%	8,56%
			Penyelenggaraan statistik sektoral	100,00%	100,00%	67.382.600	57.289.080	85,02%	14,98%
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	18,00%	82,00%	111.596.660	46.630.579	41,78%	58,22%
			Penanggulangan Bencana	100,00%	100,00%	1.015.834.540	987.989.564	97,26%	2,74%
			Penanganan Bencana	100,00%	100,00%	32.241.200	29.845.348	92,57%	7,43%
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rasa Aman • Indeks Toleransi 	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	80,33%	97,24%	2.114.076.820	2.043.177300	96,65%	3,35%
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	92,50%	100,00%	996.220.000	991.162.770	99,49%	0,51%
			Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00%	100,00%	1.207.496.585	1.086.370.210	89,97%	10,03%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	100,00%	100,00%	2.398.484.300	2.394.584.000	99,84%	0,16%
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00%	100,00%	235.367.100	218.937.700	93,02%	6,98%
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00%	100,00%	147.896.771	132.601.000	89,96%	10,34%
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100,00%	100,00%	123.923.390	104.550.000	84,37%	15,63%
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Perkapita (Juta Rupiah) • Angka Kemiskinan • Angka Pengangguran 	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	90,00%	90,00%	7.489.361.663	1.081.653.200	14,44%	35,58%
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	95,00%	94,34%	5.351.203.128	20.754.900	0,39%	99,61%
			Pengembangan ekspor	1.625.069.000.000	1.201.260.876.000	1.625.069.000.000	1.201.260.876.000	73,92%	26,08%
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	90,00%	75,00%	68.433.000	55.007.300	80,38%	19,62%
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	60,00%	40,00%	77.375.000	65.644.800	84,84%	15,16%
			Perencanaan tenaga kerja	0,3%	0,30%	9.999.520	9.071.000	90,71%	9,29%
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	0,04%	0,70%	16.169.624.980	7.680.877.403	47,50%	52,50%
			Penempatan tenaga kerja	48,00%	47,62%	89.999.480	75.165.928	83,52%	16,48%
			Hubungan industrial	100,00%	100,00%	78.929.911	78.609.900	99,47%	0,53%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	88,75%	88,75%	454.199.480	418.096.100	92,05%	7,95%
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	0,70%	0,30%	2.174.999.900	2.093.635.100	96,26%	3,74%
			Pengembangan UMKM	5,50%	5,16%	1.523.585.480	904.717.900	59,38%	40,62%
			Perencanaan dan pembangunan industri	0,35%	0,37%	55.962.895.432	8.291.758.393	14,82%	85,18%
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	30,00%	30,77%	5.000.000	2.884.000	57,68%	42,32%
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	25,00%	25,35%	5.000.000	3.284.000	65,68%	34,32%
			Pembangunan kawasan transmigrasi	100,00%	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,00%
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	100,00%	100,00%	63.998.780	52.502.500	82,04%	17,96%
			Promosi penanaman modal	8,00%	-34,00%	238.999.270	220.786.000	92,38%	7,62%
			Pelayanan penanaman modal	67,50%	78,80%	5.945.668.100	5.418.810.592	91,14%	8,86%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	3,30%	0,81%	439.537.000	312.224.200	71,03%	28,97%
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	100,00%	125.377.500	104.862.900	83,64%	16,36%
			Pengelolaan energi baru terbarukan	100,00%	100,00%	1.950.000	1.950.000	100,00%	0,00%
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	84,00%	90,02%	12.461.875.603	11.994.419.510	96,25%	3,75%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	99,00%	98,25%	3.490.099.000	2.866.410.800	82,13%	17,87%
			Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional	50,00%	50,00%	3.082.329.400	3.072.630.000	99,69%	0,31%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100,00%	100,00%	20.000.000	6.416.000	32,08%	67,92%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00%	65,00%	7.619.999.956	7.257.656.928	95,24%	4,76%
			Penataan bangunan gedung	55,00%	55,00%	2.629.999.920	2.320.130.220	88,22%	11,78%
			Penyelenggaraan jalan	89,63%	93,13%	58.602.787.940	56.047.914.653	95,64%	4,36%
			Penyelenggaraan penataan ruang	100,00%	100,00%	385.000.000	330.943.521	85,96%	14,04%
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	73,19%	80,78%	53.262.000	16.081.600	30,16%	69,81%
			Penatagunaan tanah	100,00%	100,00%	371.738.000	222.754.240	59,92%	40,08%
			Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan	100,00%	100,00%	4.656.303.900	4.455.815.035	95,69%	4,31%
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengembangan perumahan	99,40%	99,07%	1.103.755.500	1.037.551.267	94,00%	6,00%
			Kawasan permukiman	0,04%	0,02%	23.280.000	12.657.500	54,37%	45,63%
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	98,80%	98,59%	39.432.534.992	38.239.561.745	96,97%	3,03%
			Perencanaan Lingkungan Hidup	62,55%	41,44%	77.999.474	74.987.100	96,14%	3,86%
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	69,30%	59,42%	176.392.000	162.971.939	92,39%	7,61%
			Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	8,19%	8,11%	3.885.191.200	3.586.128.733	92,30%	7,70%
			Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	73,00%	75,05%	4.000.000	2.701.000	67,53%	32,48%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	42,00%	79,12%	15.700.000	13.086.700	83,35%	16,65%
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	20,00%	36,17%	25.000.000	22.261.700	89,05%	10,95%
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	20,00%	36,17%	57.300.000	35.193.276	61,42%	38,58%
			Penanganan pengaduan lingkungan hidup	43,00%	79,12%	10.070.000	7.039.600	69,91%	30,09%
			Pengelolaan persampahan	73,00%	75,06%	7.668.791.195	7.366.783.402	96,06%	3,94%
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	0,40%	10,00%	7.000.000	6.720.115	96,00%	4,00%
			JUMLAH			3.066.454.926.512	2.408.590.117.353	78,55%	21,45%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2022 Capaian Kinerja 99,01%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 78,14%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 23,26%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai $91\% \leq 100\%$), Tinggi (nilai $79\% \leq 90\%$), Sedang (nilai $66\% \leq 75\%$), Rendah (nilai $51\% \leq 65\%$) dan Sangat Rendang (nilai $\leq 50\%$), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 9 sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 sasaran dan dalam kategori tinggi sebanyak 3 sasaran.

Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.26
Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	97,00%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	83,06 %	Tinggi
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	100,00 %	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	115,94%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	131,13%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	89,15%	Tinggi
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	117,18%	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	102,59%	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	82,45%	Tinggi

PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
1.	17 Januari 2022	Kepala Daerah yang Mendukung Gerakan Zakat	Badan Amil Zakat (Baznas) Award	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
2.	23 Mei 2022	Meraih WTP Sepuluh kali Berturut-Turut	BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah	
3.	24 Juni 2022	Keterbukaan Informasi Publik Terbaik	Radar Kudus Award 2022	
4.	20 Juli 2022	Penghargaan Nirwasita Tantra Kementerian LH	Kementerian LH	
5.	27 Juli 2022	Kepala Daerah Inovatif 2022	Suara Merdeka Network	
6.	21 September 2022	Universal Health Coverage (UHC)	BPJS Kesehatan Kudus	
7.	26 Oktober 2022	Excellent Public Communication	Indonesia Awards 2022	
8.	6 Desember 2022	SAKIP dengan predikat BB dari Kementerian PAN RB	Kementerian PAN RB	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
9.	12 Desember 2022	Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian KumHAM	Kementerian KUMHAM	
10.		Perpustakaan Kabupaten/ Kota Terbaik dalam Program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial		
11.	16 Desember 2022	Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi kategori "Menuju Informatif "	Komisi Informasi	
12.		Penyaji Terbaik Pentas Seni secara virtual Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah dari Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah		
13.	20 Desember 2022	Garnas Buana Award	Kemendagri	
14.	20 Desember 2022	Universal Health Care (UHC)	BPJS Kesehatan	
15.	22 Desember 2022	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Zona Hijau (Kualitas Tertinggi)	Ombudsman RI	